PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.12, 20 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043


ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2023; PP No.88 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; PP No.28 Tahun 2018; PP No.18 Tahun 2021; PP No.20 Tahun 2021; PP No.64 Tahun 2021; PERMEN No.12 Tahun 2014; PERMEN No.14 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMEN No.7 Tahun 2022; PERDA No.11 Tahun 2016; PERDA No.1 Tahun 2019; PERDA No.13 Tahun 2021; PERDA No.5 Tahun 2023; PERGUB No.66 Tahun 2016;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan PKP, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses RP3KP dan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan rencana dan analisis RP3KP Kabupaten/Kota. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan PKP dalam upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan PKP bagi seluruh masyarakat. Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan analisis RP3KP Kabupaten/Kota dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.


CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2025.